

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI HARAPAN KEBIJAKAN PERPINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SUKABUMI

M. Rijal Amirulloh

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: mrijalamirulloh@ummi.ac.id

Abstrak

Perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi dari Kota Sukabumi ke Palabuanratu yang berjarak 60 km. sudah berjalan lebih dari 21 tahun, semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu. pada tanggal 27 Juli 1998. Namun sampai sekarang perpindahan ibukota tersebut dirasakan belum efektif, karena belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) berkantor di ibu kota. Yang disinyalir salahsatunya dikarenakan tidak mendapatkan dukungan dari para pelaksana kebijakan dan masyarakat selaku target group kebijakan. Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang penulis susun yaitu Bagaimana harapan kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuanratu?. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, dilakukan analisis kebijakan publik menggunakan metode kualitatif, berdasarkan teori yang kemukakan oleh Nugroho, mengenai salah satu ciri utama kebijakan publik berhasil, yaitu memberikan harapan. Hasilnya kebijakan tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas warga Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci : harapan kebijakan, perpindahan ibu kota Kabupaten

Expectation Of Removal Policy Sukabumi Of District Capital

Abstract

The movement of the capital of Sukabumi Regency from Sukabumi City to Palabuanratu, which is 60 km away. it has been running for more than 21 years, since the issuance of Government Regulation number 66 of 1998 concerning Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu. on July 27, 1998. But until now the movement of the capital was felt to be ineffective, because not all regional apparatus organizations (OPD) have offices in the capital. What was allegedly one of them was due to not getting support from the policy implementers and the community as the target policy group. Based on these problems, the research question that the author collated is What is the expectation of the policy of moving the capital of Sukabumi Regency to Palabuanratu ?. To obtain answers to these research questions, a public policy analysis was conducted using qualitative methods, based on the theory put forward by Nugroho, regarding one of the main features of successful public policy, which is to give hope. As a result the policy did not get support from the majority of Sukabumi Regency residents.

Keywords: policy expectations, district capital movements

A. PENDAHULUAN

Perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi dari Kota Sukabumi ke Kota Palabuanratu di Kecamatan Palabuanratu yang berjarak 60 km. sudah berjalan lebih dari 21 tahun, semenjak diterbitkannya PP nomor 66 tahun 1998 tentang "Peminahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu". pada tanggal 27 Juli 1998. Wilayah Kota Palabuanratu tersebut,

meliputi : Kelurahan Palabuhan ratu, Desa Citepus, Desa Citarik, Desa Cidadap, dan Desa Loji (pasal 1 ayat 3).

Perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ini, dilandaskan pada perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan wilayah Selatan kurang berkembang dari wilayah Utara. Sesuai dengan kebijakan nasional, dalam rangka keseimbangan antar wilayah, maka perlu diadakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, ditambah adanya

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

keinginan untuk memiliki pusat pemerintahan sendiri di wilayah Kabupaten Sukabumi (DPRD, diakses 23- 09-2016).

Dengan telah keluarnya kebijakan Kota Palabuhanratu ditetapkan sebagai pusat pemeritahan Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana pasal 1 ayat 2 PP nomor 66 tahun 1998, yang menyatakan bahwa : "Ibukota Kabupaten Sukabumi merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi". penerapan kebijakan tersebut. dilaksanakan secara bertahap, karena memerlukan pengkajian yang komprehensif. Tahapan yang dimaksud sebagai berikut : Pencanaan Pembangunan Sarana Perkantoran di Blok Jajaway dan Sarana Perumahan PNS di Tenjo Laut dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1999; Pindahan Pusat Kegiatan Pemerintahan Kabupaten dari wilayah Kota Sukabumi ke Palabuhanratu sebagai Ibukota (Palabuhanratu) dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2001.(DPRD, diakses 23-09-2016)

Kebijakan perpindahan ibu kota tersebut diperkuat lagi, dengan Peraturan Daerah nomor 22 Tahun 2012 tentang "Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032". Pada pasal 8 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Palabuhanratu memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten".

Namun sampai sekarang perpindahan ibukota tersebut dirasakan belum efektif, yakni, belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) berkantor di ibu kota, seperti : Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah, Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Peternakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Daerah, bahkan masih ada yang berlokasi diluar wilayah Kabupaten Sukabumi, yakni di wilayah Kota Sukabumi.

Sedangkan yang sudah berkantor di ibu kota Kabupaten Sukabumi. Sekretariat Daerah (SETDA), Sekretariat DPRD, Inspektorat

Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(BAPPEDA), Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Akibat yang ditimbulkan dengan kondisi tersebut adalah sulitnya koordinasi antar OPD di Kabupaten Sukabumi, sebagaimana menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi "Kita akan pindahkan semuanya kantor Dinas ke Palabuhanratu. Tapi akan dilakukan secara bertahap ... rencana pemindahan sejumlah dinas itu semata-mata ingin memberikan pelayanan maksimal kepada warga Kabupaten Sukabumi. Termasuk mempermudah koordinasi antardinas. Jika semua dinas di sini, koordinasinya akan mudah" (Cianjur Ekspres, diakses 23-9- 2016).

Salahsatu yang mengakibat perpindahan ibukota kabupaten Sukabumi dari Kota Sukabumi ke Palabuhanratu ini disinyalir salahsatunya dikarenakan tidak mendapatkan dukungan dari para pelaksana kebijakan dan masyarakat selaku target group kebijakan

Berdasarkan masalah tersebut pertanyaan penelitian ini, penulis susun sebagai berikut. "Bagaimana harapan kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu?".

B. PEMBAHASAN

Menganalisis kebijakan publik yang sudah bejalan sebagaimana menurut Patton dan Sawicky. "Analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan" (Nugroho 2014:312). Hampir sama menurut Dunn (1994:117-123) "Analisis retrospektif, yang dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, yang berorientasi pada masalah (problem- oriented analysts)", menjawab pertanyaan penelitian bagaimana harapan kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi?. dengan menggunakan teori yang dikemukakan Nugroho, meliputi Kebijakan bersifat cerdas, kebijakan bersifat bijaksana,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dan kebijakan publik memberikan harapan kepada seluruh warga.

Diharapkan penelitian analisis kebijakan publik ini, dapat memberikan informasi mengenai bagaimana harapan kebijakan perpindahan ibukota Kabupaten Sukabumi, sebagaimana menurut menurut Nugroho (2014:418) produk dari analisis kebijakan adalah advis kebijakan, nasihat kebijakan, atau lebih banyak disebut sebagai rekomendasi kebijakan. beberapa model dari rekomendasi kebijakan sebagai produk dari analisis kebijakan, yaitu : Informasi kebijakan, deskripsi kebijakan, pernyataan kebijakan, memo kebijakan, kertas kebijakan, dan rumusan kebijakan dan ahiter paper,

Dalam penelitian ini lebih menfokuskan bagaimana harapan masyarakat atau dukungan masyarakat mengenai kebijakan perpindahan ibu kota kabupaten sukabumi yang disinyalir dukungan masyarakat kurang akan perpindahan ibukota kabupaten sukabumi dari kota sukabumi ke palabuhanratu ini,

Harapan Warga Kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi dari Kota Sukabumi ke Palabuhanratu untuk masyarakat yang bertempat tinggal diluar wilayah Palabuhanratu mengecewakan sebagaimana berdasarkan penelitian Saadie (2007) Masyarakat yang berada diluar wilayah Palabuhanratu mempunyai pendapat atau pandangan yang hampir bulat tidak mendukung akan kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu, karena kebijakan tersebut merugikan bagi mereka sebagai warga diluar wilayah Palabuhanratu keadaan ini dapat terjadi antara lain, karena adanya jauh jaringan komunikasi diantara mereka dan pemerintah daerah.

Kekecewaan masyarakat Kabupaten Sukabumi wilayah utara, dibuktikan pada hari Sabtu, 23 Desember 2006 membentuk Komite Pembentukan Kabupaten Sukabumi Mandiri (KPKSM) untuk mengajukan pamekaran kecamatan- kecamatan yang berada diwilayah utara, membentuk daerah otonomi baru, mekar dari Kabupaten Sukabumi. saat ini pengajuannya menjadi Kabupaten Sukabumi Utara, tahapan pengajuan Daerah Otonomi Baru ini, tinggal menunggu paripurna DPR-RI dan terhambat oleh kebijakan moretarium daerah otonomi baru.

Samahalnya dengan wilayah utara, wilayah Jampangpun pada hari Kamis, 7

januari 2007, Forum Komunikasi Mahasiswa Jampang (FKMJ) mengajukan tuntutan pamekaran Kabupaten Sukabumi dan terbentuknya Kabupaten Jampang dimana pengajuannya sudah masuk pada rekomendasi DPD-RI untuk dimekarkan, walaupun pemerintah Kabupaten Sukabumi belum mengajukan pamekaran Kabupaten Jampang tersebut, karena Pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih memprioritaskan pamekaran daerah otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara terlebih dahulu terwujud.

Kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan Kota Sukabumi yaitu Kecamatan Sukaraja, Sukalarang, Kebonpedes dan Cireunghas (SUSUKECIR) pun membuktikan rasa kekecewaannya atas kebijakan perpindahan ibukota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu dengan mengajukan bergabung dengan Kota Sukabumi, karena secara geografis warga kecamatan tersebut apabila akan ke ibu kota Kabupaten harus melewati Kota Sukabumi. Tujuan bergabung dengan Kota Sukabumi untuk lebih mendekatkan pelayanan. Perjuangan warga Kecamatan Sukaraja, Sukalarang, Kebonpedes dan Cireunghas (SUSUKECIR) bergabung dengan kota sudah sampai pada keluarnya surat dari Walikota Sukabumi bernomor 138/640/BAPP/2014 perihal Permohonan Penambahan Ruang Wilayah Kota Sukabumi tanggal 9 Juni 2014. Dan surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 138.4/275/PUM tanggal 7 Maret 2007 dan surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor 138/1597/Desen Tanggal 4 Mei 2007 yang memerintahkan Bupati dan Walikota Sukabumi untuk melakukan kajian dan koordinasi. Alasan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum membahas pengajuan penggabungan dengan Kota Sukabumi tersebut, karena memprioritaskan program pembentukan daerah otonomi Kabupaten Sukabumi Utara terlebih dahulu terwujud dan ditakutkan apabila dibahas sebelum daerah otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara terwujud dapat mengganggu proses pembentukan DOB tersebut.

Perpindahan ibu kota ini, memuaskan masyarakat yang bertempat tinggal diselatan Kabupaten Sukabumi, khususnya sekitar Palabuhanratu, karena dengan dipindahkannya ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu, akses menuju pelayanan ke ibu kota menjadi dekat, termasuk suatu

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

kebanggaan karena wilayahnya menjadi pusat pemerintahan dan wilayah sekitar Kecamatan Palabuhanratu mengalami peningkatan, baik dari sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Mengimbangi perkembangan dengan diwilayah utara. Ditambah didorong oleh program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membangun Jalan Pantai Selatan Jawa, diwilayah Provinsi Jawa Barat sudah tersambung dari Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran.

Dari data kekecewaan masyarakat kecamatan-kecamatan diwilayah utara, masyarakat diwilayah Jampang dan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang berdekatan dengan Kota Sukabumi diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi tidak memberikan harapan kepada seluruh warga Kabupaten Sukabumi.

Kekecewaan atas perpindahan ibukota Kabupaten Sukabumi dari kota sukabumi ke palabuhanratu dapat terlihat dari kantor-kantor level daerah yang tidak mau berkantor di ibukota melainkan berkantor diwilayah utara bahkan kota sukabumi seperti kantor KPUD Kabupaten Sukabumi, BAWASLU Kabupaten Sukabumi dan BPS Kabupaten Sukabumi yang berkantor di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dan Kantor Pertanahakn Kabupaten Sukabumi dan Kantor Kementriang Agama Kabupaten Sukabumi yang berkantor di Kota Sukabumi

Selain sebagian besar masyarakat tidak mendukung akan kebijakan perpindahan ibukota kabupaten ini, para pelaksana dirasakan tidak memberikan dukungan akan kebijakan perpindahan ibukota ini, dapat dibuktikan tidak seriusnya para pelekna kebijakan ini memindahkan kantor-kantor organisasi perngakat daerah ke ibu kota hingga dengan waktu 21 tahun belum semua kantor organisasi perangakat daerah berada di ibukota kabupaten, dilihat dari sisi kinerja pelayanan kepada masyarakat pun, sangat mengecewakan dikarenakan Pegawai pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang sebagian besar bertempat tinggal disekitar ibu kota Kabupaten Sukabumi yang dulu, yaitu disekitar Kota Sukabumi, dengan dipindahkannya ibu kota Kabupaten Sukabumi Ke Palabuhanratu, maka dari tempat tinggal ke tempat kerja menjadi menjauh, yaitu berjarak 60 km atau menghabiskan waktuperjalanan 2-

2,5 jam, ditambah tempat tinggal pegawai pemerintah daerah yang berlokasi diwilayah sekitar Kota Sukabumi tersebut, sebagian besar pelunasannya masih kredit.

Mengatasi jarak tempat tinggal dengan tempat kerja Pegawai, Pemerintah Kabupaten Sukabumi membuat program Perumahan PNS di Tenjo Laut Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada tahun 1999, namut program tersebut dianggap gagal. dimana program tersebut, saat ini tidak berlanjut.

Untuk mengatasi program perumahan tenjo laut yang gagal diganti dengan program antar jemput pegawai dengan bus dari pendopo Sukabumi yang berada Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi menuju Palabuhanratu dengan jadwal pemberangkatan pada pukul 05.00 WIB dan pulang pada pukul 16.00 WIB. Bus yang mengantarkan pegawai sebagaimana gambar dibawah ini.

Jarak tempat tinggal dengan tempat kerja yang berjauhan, mengakibatkan kelelahan, yang berimbas pada rendahnya kinerja pegawai pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Ditambah kebanyakan pegawai pulang kerja lebih dulu sebelum waktu jam pulang kerja tiba karena harus persiapan diri untuk pulang karena jaraknya yang jauh. Seperti salahsatu pegawai yang diwawancarai peneliti, harus pulang dari Palabuhanratu jam 15.00, sampai ke pendopo Kabupaten Sukabumi yang berada diwilayah Kota Sukabumi sekitar jam 17.00, dilanjutkan perjalanan dari Pendopo Kabupaten Sukabumi ke rumahnya kurang lebih memakan waktu satu jam, jadi pegawai tersebut sampai ke rumahnya ketika matahari sudah terbenam (sekitar pukul 18.00).

Lemahnya kinerja pegawai pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, dapat dilihat dari rapor kinerja tahunan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2014 hingga tahun 2018 dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksasi (KEMENPAN RB) dengan nilai CC. Rentan pelayanan kepada masyarakat, baru ditahun 2019 dapat meraih nilai B.

Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sebagian besar bertempat tinggal disekitar wilayah utara, ketika ibukota dipindahkan ke Palabuhanratu, untuk mendapatkan pelayanan ke ibu kota Kabupaten Sukabumi menjadi menjauh, karena pemilihan lokasi ibu kota

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

tidak berada ditengah-tengah Kabupaten Sukabumi yang mudah dijangkau oleh seluruh kecamatan, ditambah kantor-kantor organisasi perangkat daerah yang masih berjauhan, belum semuanya berpusat di Palabuhanratu. Bahkan masih ada yang berkantor diluar wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu di Kota Sukabumi, seperti kantor Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi yang beralamat di Jalan Pelabuhan II KM. 6 No. 703 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi

Selain masalah diatas, masalah lain adalah kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi untuk memindahkan seluruh kantor organisasi perangkat daerah ke ibu kota, karena proses pemindahan ibu kota dibebankan kepada APBD Kabupaten. APBD Kabupaten Sukabumi yang jumlah hanyaberkisar Rp. 3.480.485.949.000,-/tahun (APBD tahun 2017) dengan luas wilayah 4.162 km² dan jumlah penduduk 2.453.498orang, dalam pembelanjannya harus mengutamakan yang lebih diprioritaskan dibandingkan memindahkan kantor organisasi perangkat daerah ke Palabuhanratu.

Ditambah untuk membangun pusat pemerintahan di Palabuhanratu memerlukan anggaran yang tidak sedikit, dikarenakan masalah geografis seperti postur tanah Palabuhanratu yang kurang memiliki dataran yang luas untuk membangun pusat pemerintahan suatu kabupaten, dimana disebelah utara merupakan pegunungan dan disebelah selatan lautan, menjadikan salahsatu kesulitan untuk membangun pusat pemerintahan. Tanah kosong yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diperuntukan untuk kantor-kantor organisasi perangkat daerah merupakan pebukitan. Apabila dibangun memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk meratakan tanah dan membuat pondasi bangunan yang kokoh, tanah kosong milik pemerintah Kabupaten Sukabumi

Selain masalah dari eksternal, pemasalahan diinternal pemerintahan pun muncul, yaitu kesiapan para pegawai pemerintah daerah akan perpindahan ibu kota, dibuktikan dengan kurang semangat atau lemahnya kinerja pegawai setelah dipindahkannya ibu kota ke Palabuhanratu, karena harus berpindah kantor dari Kota Sukabumi ke Palabuhanratu yang jaraknya

jauh dari tempat tinggal dan keluarga sebagai berdasarkan penelitian Saadie (2007) untuk pegawai pemerintah daerah senior dengan pemindahan ibukota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu mengakibatkan berjauhnya dengan anak dan istri atau suami yang mengakibatkan kerenggangan dengan keluarga dan sebagai besar pegawai senior tidak mendukung akan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu.

Dari data masalah-masalah diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi dari Kota Sukabumi ke Palabunratu tidak memberikan harapan yang baik bagi warga Kabupaten Sukabumi termasuk para pelaksana kebijakan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Menganalisis harapan Kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi dari kota Sukabumi ke Palabuhanratu yang sudah berjalan lebih dari 21 tahun. kebijakan tersebut dirasakan kebijakan tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas warga Kabupaten Sukabumi. Rasa kekecewaan masyarakat dapat dibuktikan dengan masyarakat wilayah utara Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2006 mengajukan mekar dari Kabupaten Sukabumi dengan membentuk Kabupaten Sukabumi Utara, pengajuannya tinggal menunggu paripurna DPR-RI.

Ditambah lembaga-lembaga negara tingkat daerah yang tidak diotonomikan tidak mau berkantor di ibukota kabupaten Sukabumi, seperti sekretariat KPUD Kabupaten Sukabumi, sekretariat BAWASLU Kabupaten Sukabumi, Kantor BPS Kabupaten Sukabumi dan kantor-kantor lainnya.

Rekomendasi

Rekomenadasi untuk pemangku kebijakan yang akan membuat kebijakan perpindahan Ibu Kota Kabupaten, diharapkan mempertimbangkan : Kepentingan masyarakat sebagai target group kebijakan Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan Mempertimbangkan sikap pelaksana kebijakan Saran untuk pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, menyikapi masalah kebijakan Perpindahan Ibu Kota Kabupaten ke Palabuhanratu Sikap tegas terhadap kedisiplinan pegawai pemerintah daerah Pelayanan kepada masyarakat dengan jemput

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

bola, supaya jarak ibu kota yang begitu jauh tidak menjadi kendala akan pelayanan kepada masyarakat dan walupun anggaran kabupaten sukabumi terbatas diharapkan dibuat rencana kapan semua kantor-kantor pemerintah daerah berkantor di ibukota kabupaten Sukabumi

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Feried, Andi Syamsul Alam & Sastro M. Wantu. 2012. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Rafika Aditama
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Putra Setia
- Dunn. William N. Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto, dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Jones. Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: Rajawali
- Kusuwanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles. Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992 *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohensi Rohidin, Jakarta: UI-Press
- Nugroho. Riant Dwijowijoto. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Rusli, Budimana. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
- Parsons, Wayner. 2005. *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana
- Purwanto, Erwan Agus, Agus Pramusinto, Wahyudi Kumorotomo, Nanang Pamuji Mugasejati, Ambar Widaningrum & Indri Dwi Apliliyanti. 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Putra, Nusa, & Hendraman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putro. Wasiti dkk. 2008. *Kajian Tentang Aktualisasi Peran Serta Masyarakat dalam perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Wahab. Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyuntingan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan atau Kebijakan :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Ke Kota Sumber eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Ke Kecamatan Cibinong Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ke Kota Soreang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025

Paraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032.

Sumber Lain :

PemkabSukabumi Bakal Pindahkan Semua Kantor

Dinas<http://cianjurekspres.com/2016/pemkab-Sukabumi-bakal-pindahkan-semua-kantor-dinas/.23/09/2016>

Saadie, Teddy Nurhadie. 2007. Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dan Budaya Pemerintahan Dalam Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Sukabumi. Disertasi Doktor dalam Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan UNPAD

Sejarah DPRD <http://dprd-Sukabumikab.go.id/sejarah-dprd/.23/09/16>